

AUSTRALIA SEBAGAI KEKUATAN REGIONAL DALAM EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DI KAWASAN PASIFIK

¹Muhammad Naser El-Haq; ²Muhammad Saef El-Islam

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

¹muhammadnaserhaq@gail.com; ²muhammadsaef65@gmail.com

Abstract

Since Australia was still a colonial territory under Great Britain, the Australian colonial administration had a goal of making Australia a regional power that had interests in the Pacific region, specifically the South Pacific. The South Pacific region itself is an area that has already been proven to have considerable natural wealth, ranging from an abundance of marine biota wealth, oil reserves which have been discovered and also have not been explored, and mineral wealth lying beneath the Pacific Earth makes this area as a very interesting area to control. The widespread influence of Australia in the Pacific region makes Australia a country that has large bargaining power in exploration and exploitation projects of natural resources in the region. This article uses the concepts of the theory of Hegemony and Regionalism with descriptive qualitative research methods which sets out some examples of cases of Australia's role as a regional power in the exploitation of natural resources in the Pacific region. Australia as a regional power in the Pacific shows a tendency to control the natural resources that are buried in the region. Various methods such as military, economic and social interventions are carried out by Australia to benefit from the natural wealth in the Pacific region.

Keyword: *regional power; exploitation of natural resources; Pacific region; South Pacific.*

Abstrak

Sejak Australia masih menjadi wilayah colonial di bawah Inggris, administrasi kolonial Australia jelas memiliki tujuan untuk menjadikan Australia sebagai kekuatan regional yang memiliki pengaruh di kawasan Pasifik, khususnya Pasifik Selatan. Kawasan Pasifik Selatan sendiri adalah kawasan yang sejak dahulu sudah terbukti memiliki kekayaan alam yang cukup besar, mulai dari melimpahnya kekayaan biota laut, banyaknya cadangan minyak bumi yang sudah ditemukan maupun masih belum di eksplorasi, dan kekayaan mineral yang tersembunyi di bawah bumi Pasifik menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang sangat menarik untuk dikuasai. Meluasnya lingkup pengaruh Australia di kawasan Pasifik menjadikan Australia menjadi negara yang memiliki *bargaining power* yang besar dalam proyek-proyek eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut. Artikel ini menggunakan konsep teori Hegemoni dan Regionalisme dengan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menjabarkan beberapa contoh kasus peran Australia sebagai kekuatan regional dalam eksplotasi sumber daya alam di kawasan Pasifik. Australia sebagai kekuatan regional di Pasifik menunjukkan tendensi untuk menguasai kekayaan alam yang tertimbun di kawasan ini. Berbagai cara dilakukan seperti intervensi militer, ekonomi, dan sosial dilakukan oleh Australia untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaan alam yang ada di wilayah Pasifik.

Kata Kunci: *kekuatan regional; eksploitasi sumber daya alam; kawasan Pasifik; Pasifik Selatan.*

Pendahuluan

Latar Belakang

Kawasan Pasifik adalah sebuah kawasan yang terletak di wilayah samudera Pasifik yang wilayahnya mencakup sebagian besar negara-negara di benua Asia, Amerika, dan Australasia. Kawasan ini memiliki luas sekitar 165.250.000. kilo meter persegi, di dalamnya mencakup berbagai negara kepulauan yang sebagian besar terletak di samudera Pasifik bagian selatan (Bardach, Morgan, & Cotter, 2019). Sejarah dari kepulauan Pasifik sebagian besar didominasi oleh sejarah perebutan sumber daya alam antar berbagai negara. Sebelum negara-negara Eropa datang penghuni pulau-pulau Pasifik telah saling memperebutkan SDA yang dimiliki oleh pulau lainnya. Sejarah permusuhan antar suku di berbagai pulau di Pasifik juga sebagian besar didominasi oleh perebutan SDA yang dikuasai oleh masing-masing suku (Anthony, 1990).

Pulau-pulau di kawasan Pasifik ini telah sejak lama dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan dunia untuk mencapai kepentingannya, kedatangan pasukan

kolonial di daerah tersebut semakin memperburuk konflik antar suku yang telah lama terjadi, mereka di adu domba satu sama lain agar para kolonialis ini mendapatkan sumber daya yang mereka inginkan. Kedatangan kaum Eropa di wilayah Pasifik menandakan dimulainya era perseteruan atas sumber daya alam. Suku Maori di New Zealand kehilangan 63 juta hektar dari total 66 juta hektar yang dimiliki ke tangan bangsa Eropa, suku Kanak di New Caledonia kehilangan seluruh tanah yang mereka miliki sejak Perancis menjajah pulau tersebut, di Fiji pemerintahan Inggris juga mengambil sebagian besar tanah yang dimiliki pribumi untuk keperluan mereka (Anthony, 1990).

Kedatangan bangsa Eropa ke kawasan kepulauan Pasifik masih terus berlanjut, negara yang baru dibuat Persemakmuran Australia adalah produk dari kebijakan bangsa Eropa mengenai kolonialisme. Awal pembentukan koloni Inggris di Australia, pemerintahan koloni masih belum berbentuk suatu negara, melainkan berbagai pemerintahan koloni yang tersebar di berbagai wilayah di Australia. Pemerintah otonomi koloni

Inggris di berbagai wilayah tersebut sejak awal berdiri telah memperluas pengaruh dan kepentingan mereka ke teritori lainnya di wilayah Melanesia dan kawasan Pasifik secara keseluruhan (Kuhn, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa Australia sebagai negara yang baru saja lahir dan berkembang dengan pesat cenderung memiliki sifat yang lebih ekspansionis dan tidak luput dari intervensi dan konfrontasi kekuatan Eropa lainnya untuk menghentikan mereka membangun koloni di wilayah Pasifik (Mückler, 2016).

Sejak berdirinya Australia, pemerintah negara tersebut menganggap bahwa mereka perlu untuk menyebarkan pengaruhnya di wilayah Pasifik melalui semacam ‘sub-imperialisme’. Hubungan politik antara Australia dan Kepulauan Pasifik saat ini adalah konsekuensi dari kebijakan sub-imperialisme pemerintahan terdahulu, dimana Australia bertindak sebagai ‘pelindung’ negara-negara Pasifik dengan cara hegemonial yang strategis. Kepentingan Australia untuk menyebarkan pengaruh mereka di wilayah Pasifik seringkali menunjukkan bahwa mereka ingin menjaga keamanan

dan meningkatkan ekonomi negara tersebut. Pada masa kolonial, Australia seringkali berusaha menahan dan menghambat Jerman dan Prancis untuk memperoleh koloni di wilayah tersebut, mereka juga melakukan aneksasi kolonial terhadap Papua Nugini untuk menguasai sumber daya alam di wilayah tersebut. Australia juga secara intens memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan dari negara-negara Pasifik untuk menjaga stabilitas regional wilayah Pasifik. Eratnya hubungan antara Australia dan negara-negara Pasifik juga menjadi salah satu agenda Australia untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang ada di wilayah Pasifik dikelola oleh perusahaan-perusahaan asal Australia (Mückler, 2016). Hal-hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan, apakah peran Australia sebagai hegemoni di wilayah Pasifik berpengaruh terhadap eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut?

Kajian Literatur (*State of the Art*)

Artikel ini dibuat dan dikembangkan berdasarkan beberapa literatur terdahulu untuk memperkaya referensi dalam penulisan artikel.

Literatur pertama yang dijadikan sumber referensi dalam artikel ini adalah sebuah thesis yang memiliki judul *Is Hegemony in South Pacific possible?* Oleh Elisapeci Samanunu Waqanivala dari *Victoria University*, Wellington pada tahun 2015. Literatur ini menjelaskan mengenai kemungkinan-kemungkinan adanya hegemoni di kawasan Pasifik Selatan, berbagai cara untuk mencapai hegemoni regional di kawasan tersebut, serta negara mana saja yang sudah dan bisa menjadi hegemon di Pasifik Selatan. Hasil dari thesis ini adalah penulis masih sulit untuk menyimpulkan siapakah yang akan memenangkan persaingan untuk menjadi hegemon regional di kawasan Pasifik Selatan. Penulis membandingkan berbagai variabel antara Tiongkok dan Amerika Serikat dalam menentukan negara manakah yang memiliki pengaruh paling besar di kawasan ini. Thesis ini terlalu terfokus terhadap persaingan AS dan RRT di kawasan sehingga terkesan melupakan pengaruh besar Australia terhadap kawasan ini.

Literatur selanjutnya adalah literature yang berjudul *Australia – A Hegemonic Power in the Pacific Region*

dalam *The Journal of Pacific Studies*, Volume 36 Issue 2, tahun 2016 yang ditulis oleh Herman Muckler. Artikel ini fokus terhadap peran Australia sebagai kekuatan hegemon di kawasan Pasifik yang sudah berusaha untuk mencapai status hegemon regional sejak terbentuknya pemerintahan kolonial Australia. Artikel ini juga menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan Australia setelah Perang Dunia ke 2, kerjasama regional antara negara-negara Pasifik dan Australia, serta usaha Australia untuk menyingkirkan pengaruh RRT di Fiji dengan memberikan sanksi ekonomi terhadap pemerintahan otoritarian Fiji yang didukung oleh RRT. Artikel ini menyimpulkan bahwa Australia masih kurang mengarahkan fokus kebijakan luar negerinya terhadap negara-negara di kawasan tersebut, sehingga Tiongkok sebagai negara yang berusaha untuk memperluas pengaruhnya dapat mengisi sisa kekosongan yang ditinggalkan Australia. Meskipun Australia masih memiliki pengaruh yang cukup besar di kawasan tersebut, namun pengaruh Australia hanya bertujuan untuk mengamankan kontrol dari sumber daya alam yang ada di kawasan Pasifik. Artikel

ini masih kurang menjelaskan secara detail tentang keterlibatan Australia dalam manajemen sumber daya alam di kawasan Pasifik.

Sebuah literatur yang ditulis oleh James M. Anthony yang berjudul *Conflict over Natural Resources in the Pacific* dalam buku *Conflict over Natural Resources in South-East Asia and the Pacific (1990)* menjelaskan mengenai bagaimana kawasan Pasifik telah lama menjadi wilayah pertarungan untuk memperebutkan sumber daya alam yang berada didalamnya. Literature ini menyimpulkan bahwa meningkatnya tensi antar negara *superpower* untuk memperebutkan kontrol atas wilayah ini dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik dalam berbagai tingkatan antara berbagai aktor internasional. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan, permasalahan dan kesempatan yang dapat mendorong persatuan antar negara-negara kecil di wilayah ini. Pengembangan politik antar negara di wilayah ini menjadi hal yang kemudian penting untuk diperhatikan oleh negara-negara di kawasan Pasifik. Sama seperti literatur sebelumnya,

literatur ini masih kurang menjelaskan keterlibatan Australia dalam pengembangan dan eksploitasi SDA di kawasan Pasifik, serta hanya berfokus terhadap bagaimana konflik untuk memperebutkan SDA mempengaruhi negara-negara di kawasan Pasifik.

Kerangka Teori

Hegemoni adalah sebuah istilah yang digunakan dalam dunia internasional untuk menggambarkan status dominan dan opresif dari sebuah entitas di suatu sistem terhadap entitas lainnya. Istilah ini pertama kali digunakan untuk menggambarkan supremasi hegemoni di Athena dimana sebuah negara-kota bernama Athena memiliki dominasi dan supremasi atas negara-kota lainnya di Yunani. Perang Peloponesia di Yunani juga merupakan suatu wujud dari perjuangan antar negara-kota di Yunani untuk menjadi hegemon di wilayah tersebut (Wilkinson, 2008). Teori Hegemoni juga mulai diperhatikan di abad ke 20 oleh Antonio Gramsci, teorist Marxist asal Italia. Gramsci berpandangan bahwa kekuatan dominan atau kelas penguasa mempertahankan dominasinya terhadap kelas subordinat,

yang menunjukkan bahwa hegemoni adalah sebuah strategi besar dalam usaha untuk meningkatkan supremasi atau dominasi (Forgacs, 2000).

Teori Hegemoni seringkali berkaitan dengan Regionalisme yang berarti kumpulan gagasan, nilai, dan tujuan yang berkontribusi pada penciptaan dan pemeliharaan tatanan di dalam sebuah kawasan. Regionalisme biasanya sangat terkait dengan kebijakan pembangunan formal yang mengarah pada pembuatan institusi regional di wilayah tersebut (Söderbaum, 2011). Dewasa ini, regionalisme sangat terkait erat dengan sifat politik global yang berubah dan meningkatnya intensitas dari globalisasi. Regionalisme ditandai oleh keterlibatan semua pemerintahan negara-negara di dunia dan juga keterlibatan aktor non negara didalamnya. Hal ini menghasilkan munculnya banyak jenis pemerintahan regional baik formal maupun non formal dan berbagai jaringan regional yang sebagian besar bergerak di bidang politik. Regionalisme kontemporer memiliki cakupan dimensi yang cukup beragam sehingga

menciptakan tantangan baru dalam politik Internasional saat ini (Söderbaum, 2011).

Hegemoni Regional adalah dominasi politik, ekonomi, militer, atau pengaruh yang dimiliki suatu negara terhadap negara lain di sekitarnya. Hubungan antara negara hegemon regional dengan negara yang berada dalam cakupan pengaruhnya relatif sama dengan pengaruh hegemon global dan negara lain di dalam suatu sistem internasional. Hegemoni Regional dianggap sebagai bagian dari sifat dasar anarki dari sistem internasional, keinginan negara untuk bertahan hidup dan ketidakpastian tujuan dan niat dari negara lain akhirnya membuat suatu negara berusaha untuk menjadi hegemon regional. Karena, status global hegemon sangat sulit untuk dicapai oleh suatu negara, dan negara yang sudah mencapai status hegemon regional akan berusaha untuk mencegah perkembangan negara yang menjadi hegemon regional di kawasan lain (Mearsheimer, 2001). Negara yang telah mencapai status hegemon regional biasanya berperan sebagai 'pemimpin' di wilayahnya, memiliki kapabilitas dan kekuatan yang

superior, serta menggunakan pengaruh yang dimiliki di wilayah tersebut secara efektif, negara hegemon juga biasanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi negara lain di sekitarnya untuk dapat menerima kepemimpinan negara tersebut (Destradi, 2010).

Pembahasan

Hegemoni Australia di Kawasan Pasifik.

Era setelah Perang Dunia ke-2 menjadi awal dari keterlibatan signifikan Australia dalam kawasan Pasifik dimana Australia pada PD II meminta bantuan Amerika Serikat dan mengalihkan dukungan mereka ke AS dari Inggris yang kekuatannya sudah tidak signifikan lagi. Sejak itu, Australia telah bertindak sebagai wakil Amerika Serikat di Pasifik dan menegakkan peraturan untuk melindungi kepentingan keamanan barat di wilayah Pasifik, yang ditetapkan , antara lain, dalam apa yang disebut pakta ANZUS antara Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru serta dalam perjanjian regional lainnya (Frame, 1993). Meskipun ANZUS terfokus

berurusan dengan kepentingan keamanan di Asia timur dan tenggara, Kepulauan Pasifik juga merupakan bagian dari strategi keseluruhan hubungan multilateral ini. Untuk Australia, terutama pulau-pulau Melanesia yang membentuk *cordon sanitaire* di wilayah utara, zona penyangga, dan zona penyebaran (Livingston & Louis, 2011). Pengaruh langsung dan besar-besaran Australia yang terus-menerus terhadap Papua Nugini (PNG) setelah bekas wilayah yang dikelola oleh Australia ini merdeka pada tahun 1975. Selain kepentingan ekonomi yang signifikan terutama dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya, kinerja PNG sebagai bagian dari segitiga yang dibentuk oleh Australia-PNG-Indonesia dan sehubungan dengan perbatasan yang panjang dan sebagian besar tidak terkendali antara PNG dan Indonesia Barat Papua, diawasi ketat oleh Australia. Hubungan Australia dengan Indonesia telah lama menjadi tegang terutama disebabkan oleh urusan Timor Timur, tetapi juga karena peran Indonesia yang meragukan di Papua Barat, yang sangat dikritik oleh LSM Hak Asasi Manusia Australia sejak tahun 1960-an dan beberapa bagian dari populasi

Australia juga. sebagai bagian dari administrasi politiknya (Mückler, 2016).

Berhubungan dengan negara-negara kepulauan Pasifik, Australia berperan sebagai mitra yang membantu dan dengan cara ini menyembunyikan ambisi hegemonik Australia yang sebenarnya untuk menjadi kekuatan regional. Ketika PNG diberikan kemerdekaan pada tahun 1975, Australia juga mengalami sebagian proses de-kolonisasi yang menyakitkan seperti yang pernah dilakukan oleh kekuatan kolonial lainnya (Denoon, 2005). Keinginan Australia untuk terus memberikan pengaruh yang menentukan pada negara-negara tetangganya adalah lebih dari sekadar keinginan untuk menegakkan perjanjian perdagangan yang ada dan menjaga akses komersial terbuka; pertimbangan strategis adalah masalah inti dan termasuk kontrol wilayah Selat Torres (Thompson, 1994). Selain itu, perwakilan resmi Australia harus mengubah dari penguasa kolonial atas subjek menjadi mitra dalam suatu kemitraan, yang pada kenyataannya tidak dengan persyaratan yang sama, tetapi yang menikmati hak yang sama oleh hukum. Karena administrator kolonial

Australia untuk waktu yang lama sebagian besar bertindak di jalur pacuan kuda, ini memang berarti beberapa perubahan. Perdana Menteri pertama PNG, Michael Somare, berangsur-angsur mencoba menjadi dibebaskan dari bekas kekuasaan kolonial. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak konflik, yang selalu diusahakan oleh orang Australia untuk diselesaikan di dalam ketertarikan mereka sendiri melalui kombinasi tekanan politik dan janji akan lebih banyak pembangunan. Strategi yang sama ini juga diterapkan untuk negara kepulauan Pasifik lainnya. Berbagai lembaga bertindak sebagai kontraktor dalam mewujudkan proyek dengan bantuan pembangunan. AusAID (Australian Agency for International Development) yang terkenal meskipun merupakan badan independen, tunduk pada kendali Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan dengan demikian merupakan instrumen langsung politik luar negeri Australia di Oseania. Misalnya, melalui proyek-proyek terkemuka yang berlangsung selama bertahun-tahun, ia berhasil memadamkan polio-myelitis di PNG. Manfaat dari program bantuan dan pengembangan

Australia sungguh luar biasa dan telah menyebabkan peningkatan yang nyata di sejumlah negara kepulauan Pasifik kecil, terutama di bidang kedokteran, pendidikan dan pelatihan kerja, serta dalam teknologi. Jenis bantuan ini kadang-kadang dikaitkan dengan open atau hiddenterme dan kondisi, di satu sisi untuk memastikan Australia tetap menjadi mitra perdagangan utama dari negara-negara pulau, dan di sisi lain untuk mendapatkan dukungan mereka untuk politik Australia Australia (Brown, 2012).

Pengaruh langsung Australia di Pasifik tidak terlalu signifikan pada dekade-dekade setelah Perang Dunia II, terlepas dari kenyataan bahwa pada tahun 1954 perwakilan kementerian luar negeri Australia secara eksplisit berbicara mendukung kebijakan ekspansionis aktif di Pasifik. Firewall alami dari pulau-pulau yang terletak di lingkungan Australia akan didominasi oleh pengaruh Australia untuk kepentingan keamanan nasional. Alasannya adalah bahwa semua saluran komunikasi dengan mitra dagang Australia yang paling penting, Jepang, berjalan melalui Pasifik Selatan, sehingga

kepentingan keamanan Canberra akan terpengaruh di wilayah ini dengan cara yang paling langsung (Mückler, 2016). Meskipun demikian, Australia bertindak dengan cara yang relatif moderat. Dalam tema yang sama dua insiden telah menyebabkan kebijakan 'lepas tangan' oleh hegemon yang bermaksud baik telah digantikan oleh kebijakan intervensi dengan 'tangan di atas'. Pertama, pada tahun 2000 ada dua kudeta dalam waktu singkat, satu di Fiji dan yang lainnya di Kepulauan Solomon. Ini khas kedua negara pulau ini, mengalami defisit struktural selama bertahun-tahun, politisi yang tidak efisien dan korup serta politisi yang korup serta garis kesalahan sosial, yang semuanya mengarah pada kudeta ini (Karle, 2005). Vanuatu dan Papua Nugini juga dianggap rapuh, diperintah oleh kepentingan minoritas politik, dan diklasifikasikan sebagai 'negara lemah' menuju status 'negara gagal'. Bagi Australia, ketidakstabilan negara-negara kepulauan Melanesia adalah ancaman langsung di mana istilah 'busur ketidakstabilan' mudah diciptakan (Rumley, Forbes, & Griffin, 2006). Australia takut bahwa Fiji dan Kepulauan Solomon mungkin

memiliki menetapkan preseden dan, mengikuti teori domino, dapat menyebabkan ketidakstabilan di seluruh wilayah. Peristiwa kedua adalah 9/11, serangan teroris di New York World Trade Center pada tahun 2001, yang menyebabkan apa yang disebut perang terhadap terorisme. Ketakutan bahwa negara-negara Kepulauan Pasifik yang tidak stabil dapat berkembang menjadi tempat perlindungan bagi para teroris, dari mana mereka akan mengatur kegiatan mereka di seluruh digunakan sebagai alasan untuk menggunakan pengaruh yang lebih aktif di Oceania, terutama oleh pemerintah konservatif Australia di bawah John Howard.

Banyak ahli beranggapan bahwa Misi Bantuan Regional ke Kepulauan Solomon (RAMSI), yang dipimpin oleh Australia, di mana kontingen militer dan para ahli dari sejumlah negara kepulauan berpartisipasi dan yang telah berlangsung sejak tahun 2003, titik balik dan klimaks dari kebijakan Australia di negara-negara Pasifik. Alasan untuk intervensi ini adalah pecahnya Kepulauan Solomon yang disebabkan oleh konflik etnis antara orang-orang di daratan Guadalcanal dan

Malaita., Ini akan mengakibatkan perang saudara dan fragmentasi seluruh negara yang mengarah pada kekerasan yang tidak terkendali, dengan regional panglima perang bertindak demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Meskipun RAMSI bukan intervensi Australia pertama - di pulau Bougainville (bagian dari Papua Nugini), yang bertindak secara separatis, Australia telah terlibat beberapa tahun lalu dalam perang lokal (sipil) (Wehner & Denoon, 2001), intervensi ini memiliki jenis kualitas baru (Glenn, 2007). Pakar politik Andreas Holtz berkomentar dalam analisis kebijakan Australia Pasifik, bahwa pendukung utama RAMSI adalah Menteri Luar Negeri Australia pada waktu itu, Gareth Evans, yang, kemudian, sebagian besar bertanggung jawab untuk merumuskan laporan '*Responsibility to Protect*' (R2P) oleh International Commission on Intervention and State Sovereignty untuk melegitimasi intervensi kemanusiaan, dan yang pendekatannya ke politik luar negeri juga termasuk komponen intervensionis (Mückler, 2016). RAMSI memainkan peran yang menentukan dalam menyelamatkan Kepulauan Solomon dari keruntuhan,

dengan melucuti para kombatan dari semua pihak yang terlibat, menstabilkan ekonomi mereka dan berhasil memulai pembentukan struktur politik dan kelembagaan yang berfungsi dengan baik. Penyediaan sumber daya Australia cukup besar, keterlibatannya dalam jangka panjang, dan, berbeda dengan intervensi serupa di bagian lain dunia, semuanya berhasil (Braithwaite, Dinnen, Allen, Braithwaite, & Charlesworth, 2011). Secara umum dapat dikatakan bahwa penanganan situasi Australia di Bougainville dan Kepulauan Solomon dapat dilihat sebagai contoh pengerahan pengaruh yang relatif hati-hati, disertai dengan berbagai tindakan non-militer dan peningkatan kesadaran. Dengan bantuan program-program sosial, model-model untuk re-integrasi, proyek-proyek yang melibatkan infrastruktur dan terbukanya perspektif ekonomi, Australia telah memberikan contoh untuk situasi serupa, yang dengan tepat mendapatkan pengakuan internasional Australia. Pandangan yang berlawanan dari intervensi terhadap Solomon Islands adalah bahwa itu bukan proyek pembangunan bangsa yang sukses, tetapi politik kekuasaan aktif seperti kampanye

anti-teror Amerika Serikat. Itu dianggap tidak jauh dari kebijakan Australia tentang intervensi di Pasifik, tetapi lebih merupakan ekspresi dari kebijakan Australia yang lebih ketat terhadap negara-negara Pasifik (Mückler, 2016).

Peran Australia dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam di Kawasan Pasifik.

Kebijakan luar negeri Persemakmuran Australia selama dua dekade telah dirancang dalam konteks kawasan Asia dan Pasifik, yang merupakan kawasan paling dinamis dan paling cepat berkembang di dunia, tetapi juga dalam keadaan tegang terkait dengan perubahan cepat dalam keseimbangan kekuatan di kawasan ini. Untuk waktu yang lama, Canberra memandang sistem internasional dalam istilah yang oleh orang Australia disebut sebagai "tirani jarak" sehubungan dengan pusat-pusat ekonomi utama dunia dan aliansi utama mereka, Inggris, dan kemudian Amerika Serikat. Sikap dasar ini tetap ada sampai hari ini: *Grand Strategy* Australia belum berubah sejak masa kolonialisme. Strategi ini mengedepankan tujuan menjadikan

Australia yang aman dalam tatanan global yang stabil, liberal, dan makmur. Australia telah menjadi negara dagang dengan ikatan strategis yang kuat dengan kekuatan maritim Barat yang dominan saat itu. Australia telah mengejar strategi pembangunan ketertiban di tingkat global, maupun regional (Argounès, 2012).

Di Pasifik Selatan, para pemimpin Australia cenderung berbicara tentang pengertian "tugas", "tambalan" dan "tanggung jawab" untuk menggambarkan konteks dan isi peran negara tersebut. Australia adalah kekuatan hegemonik di Pasifik Selatan, dan sejak akhir 1990-an, Australia telah memperkuat komitmennya terhadap kawasan dalam dua bidang utama: kontrol alat kelembagaan kawasan, dan kebijakan intervensionis yang lebih ambisius. Di bidang regionalisme, Forum Kepulauan Pasifik atau PIF, organisasi utama di Pasifik, didominasi oleh Australia. Pada tahun 2005, "Rencana Pasifik" dimulai untuk mengoordinasikan hubungan regional dan pendirian pasar regional untuk barang dan jasa, Perjanjian Perdagangan Negara Kepulauan Pasifik (PICTA), yang tidak termasuk Australia dan Selandia Baru,

dan Perjanjian Pasifik pada Closer Economic Relations Plus (PACER *Plus*), yang mencakup kedua negara. Perjanjian ini dikritik oleh beberapa pemimpin Pasifik, tetapi dipromosikan di Australia, yang lebih condong bertujuan untuk mengatur negara-negara tetangga daripada karena alasan integrasi regional yang ambisius (Argounès, 2012).

Usaha Australia dalam mengukuhkan peran mereka sebagai 'pemimpin' di kawasan Pasifik sebanding dengan keuntungan yang mereka dapatkan melalui kesepakatan-kesepakatan menguntungkan antara Australia dan beberapa negara Pasifik. Kesepakatan ini seringkali adalah hasil dari berbagai intervensi yang dilakukan oleh Australia terhadap negara-negara di kawasan Pasifik, khususnya Pasifik Selatan. Kekayaan sumber daya alam berbagai negara di Pasifik menjadi salah satu incaran Australia untuk menempatkan pengaruh mereka di negara yang memiliki kekayaan yang cukup besar, beberapa kasus menunjukkan bahwa Australia berusaha untuk mendapatkan kekayaan SDA negara-negara Pasifik.

1. Blok Migas *Greater Sunrise* di Timor Leste

Blok migas ini memiliki peran yang signifikan dalam proses sejarah Timor Leste, proses panjang berdirinya Timor Leste sangat erat dengan keberadaan sector minyak dan gas bumi di blok *Greater Sunrise*. Ladang migas ini terletak di 150 km dari garis pantai tenggara Timor Leste dan 450 km wilayah barat laut Darwin Australia yang memiliki potensi cadangan minyak senilai US\$50 Milliar. Melihat potensi tersebut, Australia berusaha untuk mendapatkan lisensi untuk melakukan eksplorasi terhadap ladang migas tersebut bahkan saat Timor Leste masih menjadi koloni Portugis, pada saat itu Portugis mengancam keberadaan Australia di dalam blok migas ini. Karena, Portugis menginginkan batas laut antara Portugis Timor dan Australia berada ditengah-tengah yang menjadikan blok *Greater Sunrise* berada di bawah wilayah Timor Leste yang menjadikan Australia tidak memiliki akses terhadap SDA yang dimiliki (Sebayang, 2019).

Australia kemudian mendukung integrasi Timor Leste terhadap Indonesia

untuk mengamankan potensi cadangan migas yang ada di wilayah *Greater Sunrise*. Sebelum Indonesia melakukan intervensi di Timor Leste, Australia dan Indonesia memulai negosiasi tentang batas-batas dasar laut, mengabaikan keberatan Portugis bahwa dasar laut harus dibatasi setengah jalan antara pantai-pantai Timor dan Australia (Sebayang, 2019). Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian “Menetapkan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu” pada 18 Mei 1971 dan 9 Oktober 1972, yang mulai berlaku pada November 1973. Perjanjian-perjanjian ini didasarkan pada prinsip landas kontinen, yang bias dalam memberikan keuntungan terhadap Australia. Karena Portugal tidak berpartisipasi, kedua negara lainnya tidak dapat menyelesaikan garis antara Timor Portugis dan Australia, menciptakan "Celah Timor" (La'o Hamutuk, 2008).

Indonesia akhirnya memulai usahanya untuk melakukan aneksasi Timor Leste hingga pada 1979 Australia memberikan pengakuan hukum *de jure* pada aneksasi Indonesia sehingga dapat bernegosiasi dengan Jakarta tentang batas laut untuk menutup Celah Timor. Selama

sepuluh tahun berikutnya, Australia dan Indonesia mengadakan lebih dari selusin putaran negosiasi. Meskipun kedua negara tidak dapat menyepakati batas dasar laut, mereka akhirnya mencapai pengaturan untuk berbagi pendapatan minyak. Hingga akhirnya pada 11 Desember 1989, Australia dan Indonesia menandatangani Perjanjian Celah Timor. Perjanjian itu menetapkan Zona Kerjasama (ZOC) antara Timor-Leste dan Australia (kemudian disebut JPDA), di utara garis tengah. Ini memberikan eksplorasi bersama Indonesia-Australia atas wilayah yang diduduki secara ilegal, dengan pendapatan dibagi 50/50. Perjanjian ini disahkan dan mulai berlaku pada 9 Februari 1991 (La'o Hamutuk, 2008).

Australia dan Indonesia memberikan kontrak bagi hasil kepada Phillips Petroleum (yang kemudian menjadi ConocoPhillips), Royal Dutch Shell, Woodside Australian Energy (kemudian disebut Woodside Petroleum) dan perusahaan lain untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya di Zona Kerjasama Celah Timor (La'o Hamutuk, 2008). Hingga

Timor Leste merdeka dari Indonesia, Australia masih terus berusaha untuk mengambil keuntungan dari ladang minyak tersebut, perjanjian yang disetujui antara Indonesia dan Australia akhirnya dilanjutkan oleh pemerintahan baru Timor Leste yang sudah merdeka. Sejak 1950-an hingga saat ini Australia masih mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari Timor Leste dan Indonesia karena mereka telah melakukan eksplorasi ladang minyak tersebut lebih awal dari kedua negara.

2. Eksploitasi Papua Barat

Alam Papua Barat masih menjadi primadona bagi para pencari keuntungan hingga saat ini, eksplorasi alam di Papua Barat yang dilakukan oleh Indonesia tidak terlepas dari peran dan dukungan finansial perusahaan-perusahaan Australia yang terkadang menjadi penyokong utama dalam eksploitasi SDA yang terjadi di wilayah ini. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) **PT. Aneka Tambang** memiliki rencana untuk membangun tambang nikel di Pulau Gag Raja Ampat dengan bantuan finansial dari **Queensland Nickel Joint Venture**

perusahaan asal Australia. Perusahaan *Joint Venture* antara Perancis dan Australia **PT. Nabire** juga telah mendapatkan izin untuk melakukan eksplorasi emas di lahan seluas 825.000 ha di Papua Barat. Mega Proyek Mamberamo juga menjadi incaran perusahaan Australia untuk melakukan Investasi didalamnya, Jerman, Jepang, dan Australia telah menyepakati untuk menanamkan modal di proyek tersebut. Lalu ada juga setidaknya 3 Perusahaan asal Australia lainnya yang melakukan eksplorasi SDA di wilayah Papua, **Hillgrove Resources** di distrik Sorong dan Manokwari, **Arc Exploration Ltd** (dahulu **Austindo Resources Corporation**) di Teluk Bintuni, melalui perusahaan bernama **PT Alam Papua Nusantara**, dan **Nickelore Ltd**, di daerah yang berbatasan dengan konsesi Freeport (Marr, 2011).

3. Eksplorasi Sumber Daya Mineral di Papua Nugini dan Bouganville

Australia dan Papua Nugini memiliki hubungan special tersendiri antar kedua negara, Papua Nugini telah menjadi bagian dari pemerintahan

kolonial Australia selama sekitar 60 tahun hingga Papua Nugini merdeka pada 1975. Sama seperti di Papua Barat, negara ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Selama ribuan tahun masyarakat asli Papua Nugini telah menambang dan memperjual-belian alat-alat yang terbuat dari batu dan oker, dan menggunakan tanah liat untuk membuat tembikar. Emas pertama kali ditemukan di Papua Nugini pada 1852 sebagai jejak yang terlihat secara tidak sengaja pada tembikar dari Teluk Redscar di Semenanjung Papua (State Library New South Wales, 2015).

Hingga saat ini Australia masih memegang lisensi penambangan mineral di berbagai lokasi pertambangan di Papua Nugini, yang pertama adalah lokasi tambang Lihir yang memproduksi emas dan perak dimiliki oleh Newcrest Mining perusahaan asal Australia, selanjutnya adalah lokasi Ramu NiCo, lokasi tambang nikel dan kobalt yang dimiliki oleh MCC Ramu Nico Ltd of China, Highlands Pacific (Australia), dan Pemerintah Papua Nugini, serta lokasi Simberi dan Edie Creek yang dimiliki oleh st. Barbara dan

Niuminco Group Limited yang keduanya adalah perusahaan asal Australia.

Kekayaan Migas yang cukup besar juga menjadi target utama investasi Australia di PNG. Proyek pipa *Liquified Natural Gas* (LNG) senilai US\$19 Miliar yang menjadi sumber utama pasokan gas cair ke Jepang, Korea Selatan, dan China yang bermula dari Papua Nugini melibatkan pemerintah Australia yang memberikan bantuan sekitar lebih dari US\$500 Juta. Proyek ini diharapkan akan meningkatkan perekonomian PNG sebanyak dua kali lipat (Knaus & Davidson, 2018).

Australia juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam kemerdekaan Bougainville dari Papua Nugini, Bougainville melaksanakan referendurnya pada 23 November 2019 lalu yang menentukan nasib wilayah ini kedepannya dengan mayoritas menginginkan kemerdekaan dari PNG. Australia berperan dalam menjadi penengah di dalam konflik antara PNG dan Bougainville yang keduanya tentu memiliki kekayaan alam yang cukup signifikan. Australia sedikit berhati-hati karena mereka tidak ingin membuat salah

satu negara tersebut kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Australia. Resolusi damai untuk masalah Bougainville penting bagi Australia. Hal tersebut menunjukkan sifat protagonis Australia selama masa colonial dan masa-masa konflik setelahnya, juga menunjukkan bahwa Australia telah banyak melakukan investasi dalam proses perdamaian di wilayah ini. Selain itu, pada saat kontes geopolitik berkembang di wilayah terdekatnya, Australia akan menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi penjamin keamanan yang andal di kawasan Pasifik. (Lowy Institute, 2019)

4. Intervensi Australia terhadap Fiji

Lokasi Fiji yang sentral dan sumber daya alam yang melimpah selalu menjadikan negara ini sebagai pemain penting di wilayah Pasifik Selatan. Pada kemerdekaannya, Fiji relatif berkembang dengan baik, dengan sumber ekonomi utamanya termasuk kayu, perikanan, dan mineral. Kemampuan Fiji untuk mengerahkan pengaruh regional semakin ditingkatkan pada awal 1980-an dengan pembentukan *Melanesian Spearhead Group* (MSG), kelompok sub-regional

baru, yang terdiri dari empat negara Melanesia di Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, dan Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), sebuah partai proindependensi di Kaledonia Baru. MSG memiliki asal-usul dalam arti luas solidaritas budaya Melanesia dan keinginan untuk menegaskan suara Melanesia di antara anggota Forum Kepulauan Pasifik, yang beberapa negara pulau dianggap didominasi oleh Australia dan Selandia Baru. Peran ini sebagai penyeimbang pengaruh Australia memiliki peran yang lebih besar sejak Kudeta Fiji pada tahun 2006, dan penengguhan negara tersebut dari Forum Kepulauan Pasifik (Brown P. , 2012).

Meskipun menghadapi situasi seperti itu, Fiji dianggap sebagai salah satu yang paling maju dari ekonomi pulau Pasifik. PDB negara pulau ini adalah \$ 4,153 miliar pada tahun 2011. Sumber daya alam Fiji termasuk emas dan tembaga. Negara ini juga memiliki potensi minyak lepas pantai. Sektor pertambangan adalah bagian penting dari perekonomian negara; namun, gula dan pariwisata adalah industri penghasil

pendapatan utama. Tambang emas dan perak utama Fiji adalah tambang emas Vatukoula, yang 100% dimiliki oleh Vatukoula Gold Mines plc. (VGM), sebuah perusahaan pertambangan emas dan perak Inggris. Pada tahun 2010, perusahaan ini mengklaim bahwa mereka telah menemukan adanya kemungkinan cadangan 26.000 kg emas di pertambangan Vatukoula. Menurut laporan tahunan perusahaan, tahun ini perusahaan telah berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi emas untuk mencapai target 100.000 ons emas per-tahun meskipun adanya hujan lebat yang menghambat proses produksi pada awal 2012. Pada tahun yang sama, Nittetsu Mining Co. dan Mitsubishi Materials Corp dari Jepang mengumumkan bahwa cadangan tembaga bermutu tinggi berada di proyek Namosi. Newcrest Mining Ltd. Perusahaan asal Australia yang memiliki lisensi pertambangan di beberapa negara yang sudah disebutkan sebelumnya juga terlibat dalam pengeboran dan eksplorasi sistem porfiri (endapan mineral yang terbentuk dan berasal dari ruang magma yang terletak dibawahnya) tembaga-emas di permukaan di wilayah Barat Waivaka.

Perusahaan mengklaim bahwa mereka menemukan bukti adanya mineralisasi di wilayah tambang tersebut (Thomas, 2012).

Kesimpulan

Dari postulat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Australia sejak awal berdirinya sudah berusaha menyebarkan pengaruhnya ke seluruh kawasan Pasifik dengan gaya sub-imperialisme mereka, dimana Australia bertindak sebagai ‘pelindung’ negara-negara Pasifik dengan cara hegemonial yang strategis. Kebijakan-kebijakan sub-imperialisme ini sangat jelas ditunjukkan oleh Australia dalam berbagai intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung yang mereka lakukan di berbagai negara Pasifik. Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Fiji, hingga Timor Leste telah merasakan bagaimana intervensi kekuatan hegemoni Australia mencapai negara mereka.

Salah satu tujuan utama dari usaha Australia dalam menyebarkan pengaruhnya di kawasan pasifik adalah untuk memastikan Australia mendapatkan

bagian dari kekayaan alam yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Pasifik. Kesamaan negara-negara seperti Papua Nugini, Fiji, dan Timor Leste adalah semua negara tersebut memiliki cadangan kekayaan alam yang melimpah. Bahkan, untuk kasus Timor Leste dan Papua Barat Australia berperan aktif dalam mendukung pemerintah Indonesia untuk mengukuhkan kekuasaan di wilayah tersebut agar pemerintah Indonesia mengizinkan perusahaan tambang asal Australia Newcrest Mining Ltd melakukan eksplorasi di kedua kawasan tersebut. Meskipun Australia gagal mengamankan pengaruhnya terhadap Fiji pada 2006 lalu, namun perusahaan tambang asal Australia Newcrest Mining Ltd. menapakkan jejaknya di kawasan pertambangan di Fiji.

Kebijakan-kebijakan sub-imperialisme ini menunjukkan bahwa Australia berusaha untuk menyebarluaskan pengaruhnya dan menggunakan statusnya sebagai hegemoni di kawasan Pasifik khususnya Pasifik Selatan dalam usahanya untuk mendapatkan bagian dari kekayaan alam yang berada di kawasan Pasifik. Berbagai

peristiwa dan intervensi yang dilakukan oleh Australia seringkali memiliki dampak yang menguntungkan bagi Australia, baik dari segi keamanan posisi Australia dalam regionalisme di kawasan Pasifik, maupun keuntungan ekonomi bagi Australia yang berusaha untuk mendapatkan bagian dari sumber daya alam di kawasan Pasifik.

Daftar Pustaka

Buku

- Anthony, J. M. (1990). Conflict over natural resources in the pacific. In L. T. Ghee, & M. J. Valencia, *Conflict over Natural Resources in South-East Asia and the Pacific*. New York: Oxford University Press.
- Braithwaite, J., Dinnen, S., Allen, M., Braithwaite, V., & Charlesworth, H. (2011). *Pillars and Shadows. Statebuilding as Peacebuilding in Solomon Islands*. Canberra: ANU E Press.
- Brown, P. (2012). *Australian Influence in the South Pacific*. Canberra: Australian Defence College.
- Denoon, D. (2005). *A Trial Separation. Australia and the Decolonization of Papua New Guinea*. Canberra: Pandanus Books.
- Forgacs, D. (2000). *The Gramsci Reader. Selected Writings 1916-1935*. New York: New York Press.
- Frame, T. R. (1993). *Pacific Partners: History of Australian-American Naval Relations*. London: Hodder & Stoughton.
- Glenn, R. W. (2007). *Counterinsurgency in a Test tube. Analyzing the Success of the Regional Assistance Mission to Solomon Islands (RAMSI)*. California: RAND Corporation.
- Karle, W. (2005). *Conflict in the 'Happy Isles': The role of ethnicity in the outbreak of violence in Solomon Islands*. Canberra: Australian Defence College.
- Kuhn, R. (2011). *Robbers and Spoilers. Australia and Britain in the 19th Century Pacific*. Canberra: Australia National University.

Livingston, W. S., & Louis, W. R. (2011). *Australia, New Zealand, and the Pacific Islands since the First World War*. Austin: University of Texas Press.

Mearsheimer, J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W. Norton & Company.

Rumley, D., Forbes, V. L., & Griffin, C. (2006). *Australia's Arc of Instability. The Political and Cultural Dynamics of Regional Security*. Dordrecht: Springer.

Söderbaum, F. (2011). *International Encyclopedia of Political Science*. Marburg: SAGE.

Thompson, A. (1994). *Papua New Guinea. Issues for Australian Security Planners*. Canberra: Australian Defence Studies Centre.

Wehner, M., & Denoon, D. (2001). *Without a Gun. Australians' Experiences Monitoring Peace in Bougainville*. Canberra: Pandanus Books.

Wilkinson, D. (2008). *Hegemonia: Hegemony, Classical and Modern*. California: Department of Political Science, University of California.

Jurnal

Destradi, S. (2010). Regional Powers and Their Strategies: Empire, Hegemony, and Leadership. *Review of International Studies* Vol. 36 No. 4, 903-930.

Mückler, H. (2016). Australia – A Hegemonic Power in the Pacific Region. *The Journal of Pacific Studies*, 137-159.

Internet

Bardach, J. E., Morgan, J. R., & Cotter, C. H. (2019, Desember 26). *Pacific Ocean*. Retrieved from Britannica: <https://www.britannica.com/place/Pacific-Ocean>